BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan kepada literatur-literatur yang membahas konsep penelitian.

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Erlina (2015:5) mengatakan bahwa:

> "Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum".

Sementara menurut Nurmalia Hasanah (2016:195) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

> "Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat transaksi keuangan daerah sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lain terkait dengan keuangan daerah".

Sedangkan Menurut Abdul Halim (2014: 94) mengatakan bahwa:

> "Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset".

Dari Pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah Proses akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara manual maupun komputerisasi.

2.1.1.2 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

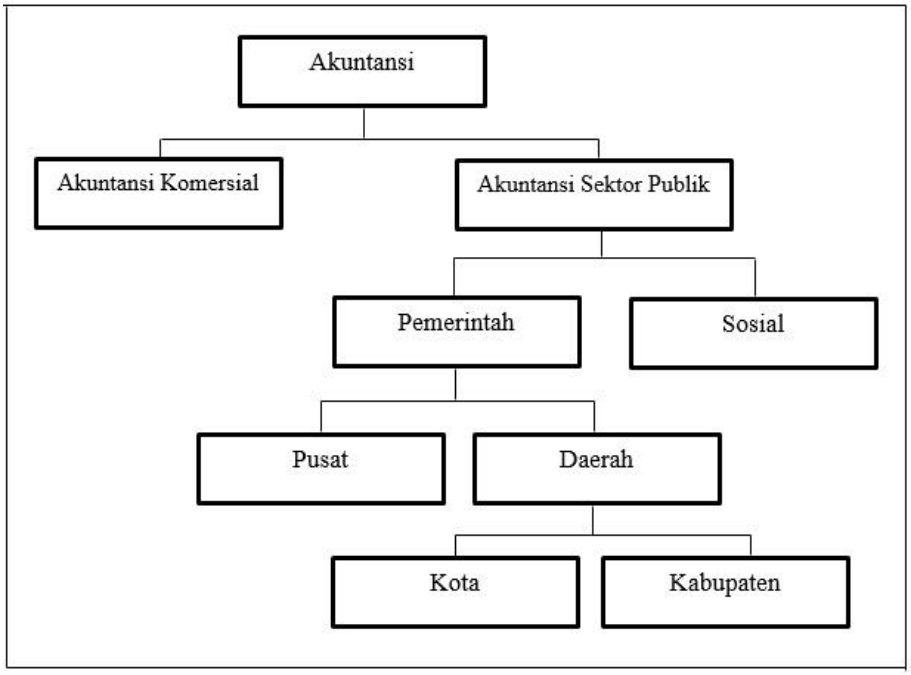
Erlina (2015:2) mengatakan secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Menurut Erlina (2015:2) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari 2 bidang utama, yaitu:

1) Akuntansi Komersial Perusahaan
   Dalam akuntansi komersil, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan penetapan pajak. Akuntansi komersial perusahaan adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba.
2) Akuntansi Sektor Publik
   Akuntansi sektor publik adalah yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau lebih dikenal dengan standar akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik dibagi atas :
   a) Akuntansi Pemerintahan
      Akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara seragam diseluruh pemerintah daerah.
   b) Akuntansi Sosial
      Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Akuntansi ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti

partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan klasifikasi di atas, kedudukan akuntansi keuangan daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah



Sumber: Erlina, dkk (2015:3)

Gambar 2.1
Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.3 Sistem Pencatatan

Menurut Erlina (2015:4) mengatakan bahwa akuntansi keuangan daerah terdapat proses pencatatan, pengidentifikasian, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Menurut Erlina Rasdianto (2015:4) dalam proses pencatatan yang merupakan salah satu proses akuntansi, akuntansi menggunakan sistem pencatatan.

Menurut Erlina Rasdianto (2015:4) Ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

1) S*ingle entry*
2) *Double entry*
3) *Triple entry*

Adapun penjelasan sistem pencatatan yaitu sebagai berikut:

1) *Single Entry*
   Sistem pencatatan *single entry* disebut dengan sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transasksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum. *Single entry* ini disebut dengan pembukuan, sedangkan dalam akuntansi sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem *double entry* atau *triple entry*.
2) *Double Entry*
   Sistem pencatatan *double entry* disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem d*ouble entry* sering disebut dengan istilah menjurnal. Pada masa sebelum reformasi, sistem pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku tunggal (*single entry*). Tetapi setelah reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan d*ouble entry.*
3) *Triple Entry*
   Sistem pencatatan *triple entry* adalah sistem pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem *triple entry* ini dilaksanakan saat pencatatan *double entry* dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit.

2.1.1.4 Basis Akuntansi Pemerintahan

Dalam proses pencatatan dibutuhkan basis akuntansi dalam menentukan kapan transaksi atau kejadian harus diakui. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual.

Menurut Nurlan Darise (2008:38) mengemukakan bahwa:

> "Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan".

Adapun basis akuntansi pemerintahan Menurut Erlina (2015:11) terdiri dari tiga basis yaitu:

1) Akuntansi berbasis kas
2) Akuntansi berbasis kas menuju akrual
3) Akuntansi berbasis akrual

Adapun penjelasan basis akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1) Akuntansi berbasis kas
   Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aset dan kewajiban.

2) Akuntansi berbasis kas menuju akrual
   Akuntansi berbasis kas menujuakrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (PP No. 24 Tahun 2005)
3) Akuntansi berbasis akrual
   Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.1.5 Siklus Akuntansi

Menurut Abdul Halim (2014:56) mengatakan akuntansi adalah suatu sistem, suatu sistem mengelolah *input* (masukan) dan menjadi *output* (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outpunya adalah laporan keuangan.

Menurut Erlina Rasdianto (2015:6) mengemukakan bahwa:

> “Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi”.

Sementara menurut Nurlan Darise (2008:41) mengemukakan bahwa:

"Untuk dapat memahami penyusunan laporan keuangan harus terlebih dahulu memahami siklus akuntansi".

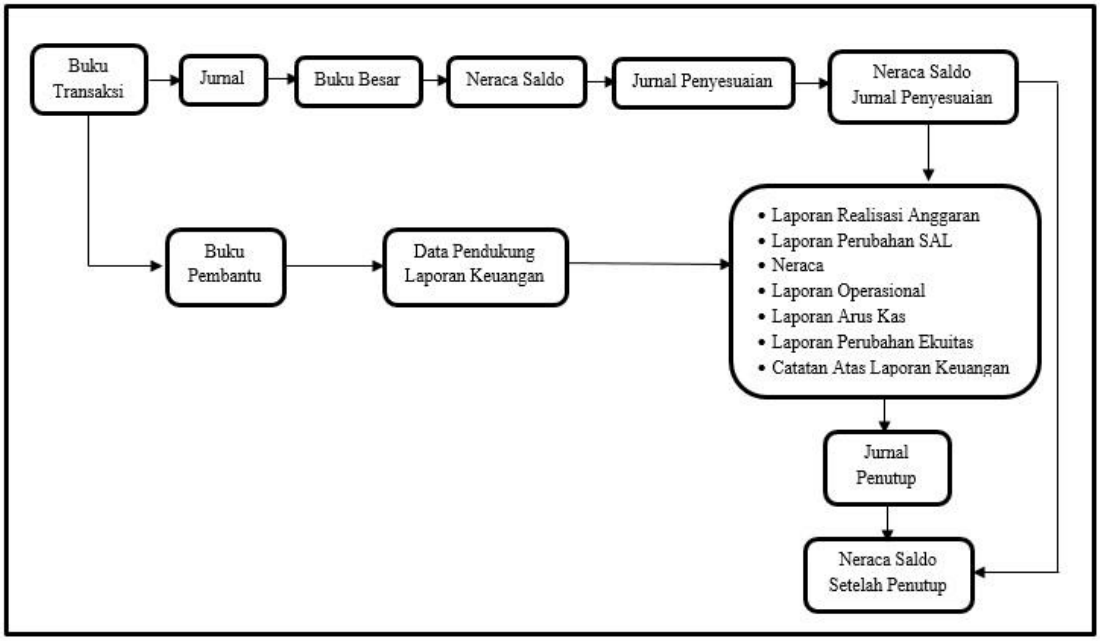
Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa siklus akuntansi terdiri dari tahap-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan.

Adapun tahap-tahap siklus akuntansi pemerintahan menurut Erlina Rasdianto (2015:6) sebagai berikut:

1) Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2) Mencatat transaksi ke dalam buku jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal.
3) Meringkas dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut memposting atau mengakunkan.
4) Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkannya ke dalam neraca saldo.
5) Melakukan penyesuaian buku besar berdasarkan informasi yang paling terbaru *(up to date)*.
6) Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan memindahkannya kedalam neraca saldo setelah disesuaikan.
7) Menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan.
8) Menutup buku besar.
9) Menentukan saldo-saldo buku besar dan memindahkannya ke dalam neraca saldo setelah tutup buku.

Tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah dapat digambarkan seperti Gambar 2.2 berikut ini:

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah



Sumber: Erlina, dkk (2015:7) **Gambar 2.2**

Siklus Akuntansi keuangan Daerah

2.1.1.6 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:99), Deddi Nordiawan (2014:201), dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1) Pencatatan
2) Pengikhtisaran
3) Pelaporan

Adapun penjelasan indikator sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

1) Pencatatan
   a) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
   b) Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.

c) Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

2) Pengikhtisaran
   a) Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
   b) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.
   c) Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
   d) Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
   e) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
   f) Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.

3) Pelaporan
   Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Adapun pengertian kompetensi dan sumber daya manusia yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Spencer dalam Moeheriono (2012:5) mengemukakan bahwa:

> "Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu".

Menurut Ardeno Kurniawan (2015:118) mengemukakan bahwa:

> "Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya".

Sedangkan Hutapea dan Thoha, (2008:7) mengemukakan bahwa:

> "Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh perkerjaan tersebut".

Menurut Narawi dalam Chr. Jimmy L. Gaol (2015:44) mengemukakan bahwa:

> "Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif)".

Sedangkan Wirawan (2015:18) mengemukakan bahwa:

> "Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi".

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh perkerjaan tersebut.

2.1.2.2 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Moeheriono (2012:6) dan Hutapea dan Thoha (2008:28) komponen utama pembentukan kompetensi diantaranya:

1) Pengetahuan *(Knowledge)*
2) Keterampilan *(Skill)*
3) Sikap *(Attitude)*

Adapun penjelasan indikator kompetensi sumber daya manusia yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan *(Knowledge)* adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu).
2. Keterampilan *(Skill)* merupakan suatu kemampuan dan upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.
3. Sikap *(Attitude)* merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun pengertian kualitas dan laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Iman Mulyana (2010:96) dalam Susilawati (2014) mengemukakan bahwa:

> "Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan".

Pengertian laporan keuangan pemerintah daerah yang dikemukakan oleh Dadang Suwanda dan Hendri Santosa (2015:26) sebagai berikut:

> "Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah".

Sementara menurut M. Yusuf (2013:1) mengemukakan bahwa:

> "Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang di dalamnya mencakup brrbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca (kini dikenal sebagai "laporan posisi keuangan") daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporanya setelah pelaksanaan anggaran.".

Sedangkan menurut Erlina, dkk (2015:19) mengemukakan bahwa:

> "Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya".

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi dan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang memerlukannya.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun tujuan laporan keuangan secara umum dan khusus yang dikemukakan Erlina, dkk (2015:20) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

> "Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya".

Sedangkan tujuan laporan keuangan secara khusus sebagai berikut:

> "Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara khusus adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya".

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.

2.1.3.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Deddi Nordiawan, dkk (2012:131) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa:

> "Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya".

Menurut Erlina, dkk (2015:8) dan Mahmudi (2010:11) Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1) Relevan
2) Andal
3) Dapat dibandingkan
4) Dapat dipahami

Adapun penjelasan indikator laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1) Relevan.
   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:

   a) Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value).*
      Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
   b) Memiliki manfaat prediktif *(predictive value).*
      Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
   c) Tepat waktu.
      Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
   d) Lengkap.
      Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal.
   Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:
   a) Penyajian jujur.
      Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
   b) Dapat diverifikasi *(verifiability).*

Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas.
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tetentu.

3) Dapat dibandingkan.
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4) Dapat dipahami.
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau mengggunakan aplikasi komputer (Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:99). Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diharapkan akan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan tuntutan masyarakat (Ifa Ratifah, 2012). Sistem akuntansi

keuangan daerah merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah (Ifa Ratifah, 2012).

Proses pelaporan keuangan pemerintah harus dikerjakan oleh SDM yang memiliki kompetensi agar mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas (Akhmad Syarifudin, 2014:27). Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya (Akhmad Syarifudin, 2014:31). Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Arfianti & Kawedar, 2013:8). Dengan demikian, Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Indra Kesuma, 2014:73).

Laporan keuangan Pemerintah daerah, disajikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Mahmudi, 2010:3). Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Mahmudi, 2010:2). Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan

keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Mahmudi, 2010:2). Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan (Mahmudi, 2010:3).

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Pramono Hariadi (2013:131) mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, diperlukan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang memadai".

Menurut Abdul Halim (2014:31) mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

> "Akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu, serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan".

Menurut Mahmudi (2010:27) mengemukakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas".

Menurut Tutun Hermawanto (2013:2) mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

> "Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan".

Menurut Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

> "Model regresi variabel SAKD signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk SAKD sebesar 0,039 ($\alpha < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan variabel SAKD mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan".

Menurut Kadek Desiana Wati, dkk (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

> "Berdasarkan analisis statistik pada tabel 1 dalam penelitian diperoleh nilai koefisienregresi sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,135. Hal ini berarti system akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan nilai signifikani sistem akuntansi keuangan daerah adalah 0,021<0,05. Hal ini berarti sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah".

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi keuangan Daerah yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut M. Yusuf (2013:154) mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

> "Apabila tidak mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah atau tidak bisa memberikan pelayanan perizinan dengan baik, itu juga karena pegawaainya kurang kompeten".

Menurut Warisno (2009) dalam Indra Kesuma (2014:76) mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

> "Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah".

Menurut Dewi Andini (2015:1) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

> "Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan".

Menurut As Syifa Nurillah, Dul Muid (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

> "Pernyataan hipotesis pertama (H1) dapat diterima, maka variabel kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel SDM yang bernilai 0,186 dengan tingkat signifikansi 0,032. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi SDM, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan".

Menurut Iftitah Dian Humairoh (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

> "Berdasarkan hasil analisis regresi diatas (tabel 6) dapat dilihat nilai signifikansi untuk kompetensi SDM sebesar 0.038 lebih kecil dari 0.05. maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah".

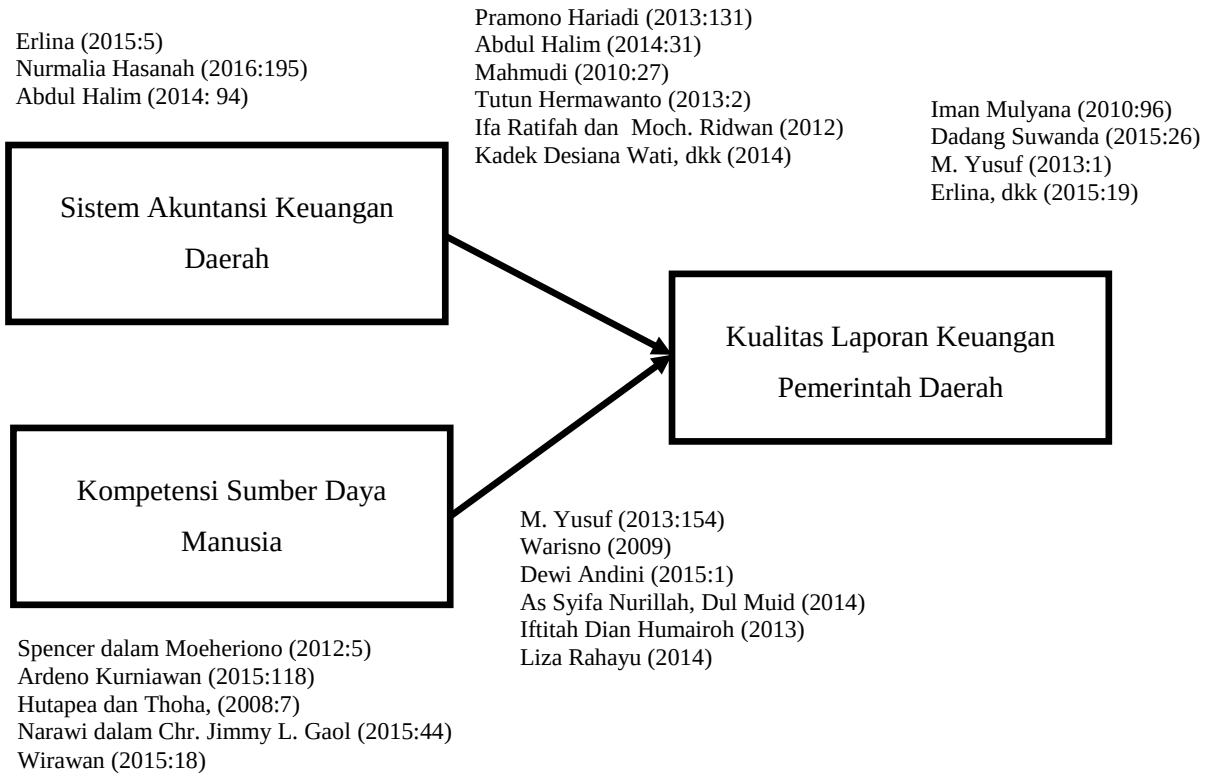
Sedangkan Menurut Liza Rahayu, dkk (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

> "Berdasarkan analisa data menyatakan bahwa variabel kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember".

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dari penelitian ini dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:

Paradigma Penelitian



Gambar 2.3
Paradigma Penelitian

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan proses kesinambungan dari penelitian sebelumnya untuk mendapat informasi yang valid mengenai permasalahan peneliti, yaitu mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat dari Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan. (2012) ISSN: 1411-514X	Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Model regresi variabel SAKD signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk SAKD sebesar 0,039 ($\alpha < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan variabel SAKD mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2.	Ni Made Rika Krisna Dewi, Ni Kadek Sinarwati dan Nyoman Ari Surya Darmawan. (2014) (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terbukti dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3.	Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014) (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Berdasarkan analisis statistik pada tabel 1 dalam penelitian diperoleh nilai koefisienregresi sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,135. Hal ini berarti system akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan nilai signifikani sistem akuntansi keuangan daerah adalah 0,021<0,05. Hal ini berarti sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4.	Subadriyah dan Anita Rahayuningsih. (2015) ISSN: 2407-9189	Analisis Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Berdasarkan pengolahan data hasil kuesioner mengenai sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, bahwa dengan adanya kualitas sistem akuntansi keuangan daerah terbukti bahwa berpengaruh terhadap kualitas laporan keaungan pemerintah daerah dengan signifikansi 0.000.
5.	Tutun Hermawanto Botutihe (2013) Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo	Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terbukti memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Gorontalo
6.	As Syifa Nurillah, Dul Muid (2014) ISSN (Online): 2337-3806	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Pernyataan hipotesis pertama (H1) dapat diterima, maka variabel kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel SDM yang bernilai 0,186 dengan tingkat signifikansi 0,032. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi SDM, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

		Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)	
7.	Yusar Sagara, 2015 ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6, No.10, 2015	The Effect of Implementation Accounting Information System and Competence of Human Resources on the Quality of Financial Reporting	human resources competencies is a major cause of poor quality of financial reporting in Lebak Banten Indonesia.
8.	Liza Rahayu, Kennedy dan Yuneita Anisma (2014) JOM FEKON Vol. 1 Nomor. 2 Oktober 2014	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)	Kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung variabel kompetensi SDM > t tabel.
9	Dewi Andini dan Yusrawati (2015) Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I Vol. 24 No. 1 Juni 2015	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Empat Lawang	Berdasarkan hasil analisis regresi diatas (tabel 6) dapat dilihat nilai signifikansi untuk kompetensi SDM sebesar 0.038 lebih kecil dari 0.05. maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
10.	Iftitah Dian Humairoh (2013) Artikel Ilmiah Mahasiswa 2013 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Jember)	Berdasarkan analisa data menyatakan bahwa variabel kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

2.4 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran. Menurut Sugiyono (2013:99) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan penulis. Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat.

H_2: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat.